



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2024-2026**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Perubahan Rencana Strategis tahun 2024-2026 ini dapat tersusun. Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini adalah dokumen pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk 3 tahun ke depan. Penetapan Perubahan Rencana Strategis adalah deskripsi dari tujuan yang bisa diukur yang akan dicapai secara nyata dalam periode 3 tahun. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus spesifik, terinci dan dapat diukur.

Disadari bahwa Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang disusun ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, diharapkan saran/masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Strategis yang disusun ini dapat memberikan manfaat baik dan menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Pontianak, Maret 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



Samuel, SE, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 1966040819931009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	14
GAMBARAN PELAYANAN SKPD	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	14
1. Kepala Dinas;	15
2. Sekretariat	16
3. Bidang Informasi Publik.....	20
4. Bidang Komunikasi Publik	21
5. Bidang Aplikasi Informatika	23
6. Bidang Persandian dan Statistik.....	26
7. Kelompok Jabatan Fungsional	30
2.2. Sumber Daya OPD	31
1. Sumber Daya Aparatur	31
2. Sarana dan Prasarana (Asset)	33
2.3. Kinerja Pelayanan OPD.....	39
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	40
BAB III.....	42
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD	42



3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	42
3.2. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.....	43
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	44
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	44
BAB IV	46
TUJUAN DAN SASARAN	46
4. 1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah	46
1. Tujuan.....	46
2. Sasaran	46
BAB V	48
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
BAB VI	51
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	51
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	51
6.2. Pendanaan Indikatif.....	65
BAB VII	66
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII	67
PENUTUP.....	67



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis memuat penyesuaian perencanaan berbasis kinerja karena adanya perubahan terkait penyusunan perencanaan berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memberikan panduan terhadap hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini menjadi acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka mencapai indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja dan target Kepala Daerah, khususnya untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat terkait Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, dan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat merupakan OPD yang baru dibentuk tahun 2017. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014, dimana terdapat pembagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat



menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik.

Diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah. Adapun urusan yang diserahkan kepada daerah mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014, membagi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan dibagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Urusan Non Pelayanan Dasar terdapat 18 urusan yang diantaranya terdapat urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya diperkuat juga melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adanya Perda tersebut selanjutnya dibentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai acuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu Komunikasi dan Informatika, diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan



bernegara, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Selain itu, diharapkan pula masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kalimantan Barat.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayanan masyarakat.

Kondisi saat ini, pengaruh global Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempengaruhi seluruh sektor kehidupan manusia (sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dll). Salah satunya kemudahan pertumbuhan ekonomi dan penyebaran informasi secara luas, baik dalam lingkup lokal/regional/global. Pesatnya perkembangan informasi yang tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi. Kondisi demikian tentu menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur,



pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Kewenangan lainnya yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu urusan persandian. Persandian merupakan kegiatan di bidang pengamanan berita yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada profesi sandi. Saat ini, terjadi perubahan paradigma dan arah penyelenggaraan persandian di daerah diantaranya persandian tidak hanya sekedar terima dan kirim berita, tidak hanya melayani kepala daerah dan persandian tidak hanya terbatas pada informasi rahasia.

Peran persandian dalam pengamanan informasi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), keaslian (*authentication*), dan tidak ada pengingkaran (*non repudiation*) informasi yang disandikan. Seiring perkembangan TIK, sangat diperlukan peran persandian yang memberikan jaminan keamanan informasi guna mewujudkan ketahanan informasi nasional dalam menjaga kedaulatan NKRI. Selain itu, dengan terjaminnya keamanan informasi pemerintah daerah, persandian turut berkontribusi terhadap kelancaran pembangunan daerah.

Selain melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik. Kegiatan statistik merupakan kegiatan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya dari 3 jenis



statistik, terdapat jenis statistik yang penyelenggaraannya kewenangannya terdapat di daerah yaitu statistik sektoral yang penyelenggaraannya dikumpulkan oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 pasal 1 angka 6, penyelenggaraan statistik sektoral pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di pandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis tahun 2024 – 2026. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 sampai tahun 2026. Rencana Strategis akan menentukan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah dan tolak ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.



11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003);
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
22. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
28. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
32. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat



(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 124 ;

33. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Nomor 17);
34. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 disusun bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis ini menjadi acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) Tahun 2024 – 2026 yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Merupakan satu acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD.
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk monitoring dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Organisasi Perangkat Daerah.
3. Agar lebih dapat memahami tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.



Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
2. Mempertegas adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kalimantan Barat yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Dokumen Renstra sebagai tolak ukur atau parameter dalam menentukan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Tahunan.
4. Dokumen Renstra sebagai pedoman dan acuan dalam implementasi pembuatan dokumen rencana kerja dalam menentukan anggaran yang berbasis pada kinerja

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) OPD (Diskominfo Prov. Kalbar) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja



sumber daya yang dimiliki OPD, capaian penting yang telah dihasilkan melalui Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian Program Prioritas OPD dan menganalisis hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas fungsi sampai dengan satu eselon di bawah OPD. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang berbagai macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup Sumber Daya Manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD



Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Kabupaten/Kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada tiga tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- b. Perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang informasi publik, komunikasi publik,



aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 124 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan sebagai berikut :

Adapun Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- b. Perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap



penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;

- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta



- keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
 - f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Berikut merupakan uraian tugas dari Sub Bagian Umum Aparatur dan Subbagian Keuangan dan Aset.



a. Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- i. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- ii. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- iii. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- iv. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- v. Pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. Pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- vii. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- viii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas fungsi di bidang umum aparatur;
- ix. Pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan



keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan Dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- i. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- ii. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- iii. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- iv. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- v. Pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- vii. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- viii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- ix. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.



3. Bidang Informasi Publik

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik serta pelayanan informasi publik bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Informasi Publik;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial), pengumpulan pendapat umum (survei/jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat, layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah provinsi, layanan pengaduan masyarakat, fasilitasi Komisi Informasi Provinsi (KIP), fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang komunikasi publik.



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Komunikasi Publik;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/ media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah provinsi, penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah provinsi, pengembangan sumber daya komunikasi publik, serta layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;



- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintahan berbasis elektronik, infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang aplikasi informatika. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Aplikasi Informatika;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur



teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, layanan interoperabilitas, layanan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan, layanan pusat Application Program Interface (API), serta sistem pencegahan korupsi terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kegiatan di bidang tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, pengelolaan layanan nama domain, sub domain lembaga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pelayanan publik dan kegiatan di provinsi, pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smart city), layanan sistem informasi smart city, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smart city, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta pengembangan aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan kegiatan di bidang Government Chief Information Officer (GCIO) dan pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government kabupaten/kota, koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah, integrasi pengelolaan TIK dan e-government



pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, pengembangan masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city, implementasi e-government dan smart city, promosi pemanfaatan layanan smart city, serta fasilitasi pengembangan ekonomi digital/e-commerce sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah daerah serta pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan disaster recovery center (DRC), pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-government, pengembangan SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, government cloud computing, pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah, serta fasilitasi pelayanan KPU/USO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;



- j. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang aplikasi informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik dan analisis data serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang persandian dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Persandian dan Statistik;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan



- analisis data statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi, layanan monitoring trafik elektronik, penanganan insiden keamanan informasi, pengembangan SDM di bidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, bimbingan teknis keamanan informasi dan persandian, serta layanan filtering konten negatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyelenggaraan satu data Indonesia, identifikasi kebutuhan data, membangun rancangan pengumpulan data dan implementasi rancangan penghimpunan data, penghimpunan data di lapangan dan data perangkat daerah, integrasi data klasifikasi, penginputan, penimbang, estimasi dan agregat data, pengelolaan hasil pengolahan data, penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan, recovery data dan informasi survei untuk penyediaan data statistik sektoral, koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, penyediaan peralatan infrastruktur, penyajian data statistik sektoral, penyelenggaraan forum data dan wali data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik sesuai



ketentuan peraturan perundangundangan;

- g. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Persandian dan Statistik membawahi :

- a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
 - b. Seksi Analisis Data Statistik.
-
- a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :



- i. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
- ii. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi;
- iii. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- iv. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang persandian dan keamanan informasi, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi, layanan monitoring trafik elektronik, penanganan insiden keamanan informasi, pengembangan SDM di bidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, bimbingan teknis keamanan informasi dan persandian, serta layanan filtering konten negatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- vi. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- vii. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
- viii. Pelaksanaan fungsi lain di bidang persandian dan keamanan informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang;



b. Seksi Analisis Data Statistik

Seksi Analisis Data Statistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang analisis data statistik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Analisis Data Statistik mempunyai fungsi :

- i. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Analisis Data Statistik;
- ii. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis data statistik;
- iii. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang analisis data statistik;
- iv. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang analisis data statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;
- vi. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;
- vii. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;
- viii. Pelaksanaan fungsi lain di bidang analisis data statistik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

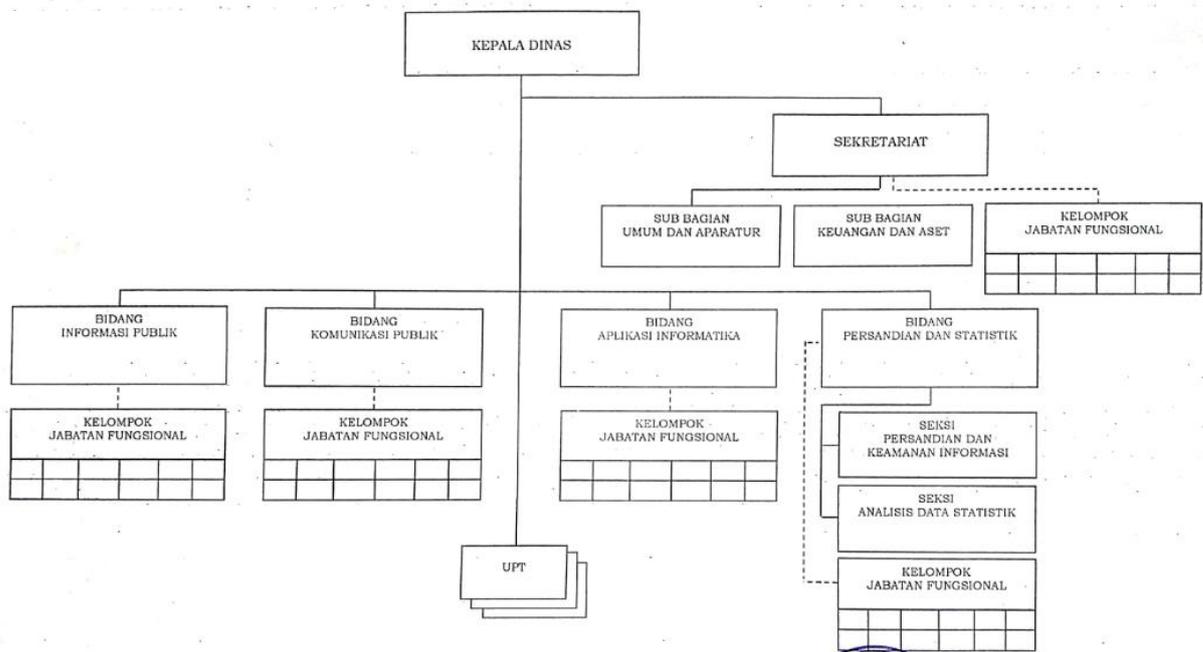
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan



secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1



Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja yang diamanatkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh kondisi sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dan sumber dana.

2.2. Sumber Daya OPD

1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah personil yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2023 berjumlah 49 orang, dengan susunan sebagai berikut :



- Eselon II Berjumlah 1 (satu) Orang
- Eselon III Berjumlah 4 (empat) Orang
- Eselon IV Berjumlah 3 (tiga) Orang
- Staf Non Eselon Berjumlah 41 (empat puluh satu) Orang

**Tabel 2.1
Pejabat Struktural Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat**

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Diklat Struktural	Jenis Kelamin	Ke t.
1)	Samuel, SE., M.Si 19660408 199303 1009	Pembina Utama Madya / IVd	Kepala Dinas	Strata 2	1. SPAMA Teknis Fungsional Dinas Staf, 2. Diklatpim Tk.III 3. Aplikasi Penyusunan APBN	L	
2)	Drs. Marwan Seregar, M.Si 19740520 199311 1001	Pembina / IVb	Sekretaris	Strata 2	1. Diklatpim Tk. III 2. Sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer 3. Sertifikat Kopetensi	L	
3)	Maria Wijayanti, ST,MT 19730105 200212 2001	Pembina Tk.I / IVb	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Strata 2	1. Diklatpim Tk.II	P	
4)	Reza Afrizal, S.Pi., M.E 19800411 200502 1003	Pembina / IVa	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Strata 2	1. Diklatpim Tk. IV 2. Pelatihan Teknis Presentasi	L	
5)	Uslan, S.Sos, MM 19710224 199003 1002	Pembina / IVa	Kepala Bidang Informasi Publik	Sarjana	1. Diklatpim Tk. III 2. Sistem Informasi Geografi UTK Pelay Informasi dan pencad wil pertamb	L	



No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Diklat Struktural	Jenis Kelamin	Ke t.
6)	Heronimus Sonni, S.Kom 19780222 201101 1 002	Pembina Tk.I / IIIId	Plt. Kepala Bidang Komunikasi Publik	Sarjana	1. Diklatpim Tk.IV	L	
7)	MUH. Rijal, S.STP 19940708 201609 1 001	Penata Muda Tk I /IIIb	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sarjana	-	P	
8)	Sylvia Josepha Maria Pessy, SIP, MT 19690218 198903 2 005	Pembina/ IVa	Kepala Sub Bagian Umum Dan Aparatur	Strata 2	1. Diklatpim Tk.IV 2. Diklat Karakterdes	P	
9)	Hendra, S.Sos, M.Si 19690612 199003 1 003	Pembina / IVa	Kepala Seksi Analisis Data Statistik	Sarjana 1	1. Diklatpim Tk. Iv 2. Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah	L	
10)	M. Ferri Sutriana, A.md 19881203 201101 1 002	Penata Muda Tk. I / IIIb	Plt. Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	Diploma III	Pelatihan Penyerangan Bagi Pejabat Pranata Komputer	L	

*Bagian Umum Aparatur Diskominfo Prov. Kalbar Desember 2023

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk mendukung dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sendiri terletak di Jalan Ahmad Yani Kompleks Kantor Gubernur Gedung Pelayanan terpadu Lantai 6 telah tersedia beberapa sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam kondisi baik yang terdiri dari :



Tabel : 2.2
Sarana dan Prasarana
Di Diskominfo Prov. Kalbar Tahun 2023

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3		4
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	3	Unit	Alat Angkutan
2	Kendaraan Roda 2 (Dua)	2	Unit	Alat Angkutan
3	Lemari Besi/Metal	44	Unit	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
4	Rak Besi/Metal	7	Unit	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5	Brankas	1	Unit	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
6	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	10	Buah	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
7	Filing Besi/Metal	13	Unit	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
8	Alat Penghancur Kertas	2	Unit	Peralatan Kantor Lainnya
9	Papan Nama Instansi	1	Buah	Peralatan Kantor Lainnya
10	White Board	1	Buah	Peralatan Kantor Lainnya
11	Mesin Absensi	3	Unit	Peralatan Kantor Lainnya
12	Alat Sidik Jari	1	Unit	Peralatan Kantor Lainnya
13	Rak Kayu	3	Buah	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
14	Papan Tulis	1	Buah	Peralatan Kantor Lainnya
15	Buffet Kayu	7	Buah	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
16	Layar Film/Projector	5	Buah	Peralatan Studio Video dan Film
17	Meja Kerja Kayu	28	Buah	Meubelair
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	128	Buah	Meubelair
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	Buah	Meubelair
20	Meja Kayu/Rotan	1	Buah	Meubelair
21	Kursi Besi/Metal	15	Buah	Meubelair
22	Meja Rapar	7	Buah	Meubelair



NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>
23	Meja Rapat Pejabat Eselon III	3	Buah	Meubelair
24	Meja Podium	1	Buah	Meubelair
25	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	59	Buah	Meubelair
26	Kursi Tamu	21	Buah	Meubelair
27	Kursi Tamu Diruangan Pejabat Eselon II	1	Buah	Meubelair
28	Kursi Tamu Diruangan Pejabat Eselon III	3	Buah	Meubelair
29	Kursi Biasa	5	Buah	Meubelair
30	Kursi Putar	10	Buah	Meubelair
31	Meja Komputer	2	Buah	Meubelair
32	Tikar/Karpet	3	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
33	Sofa	7	Set	Meubelair
34	Lemari Es	1	Unit	Alat Pendingin
35	AC Split	18	Unit	Alat Pendingin
36	Televisi	41	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
37	Monitor LCD	2	Unit	Personal Komputer
38	Video Monitor	32	Unit	Peralatan Studio Video dan Film
39	KVM Keyboard Video Monitor	18	Unit	Peralatan Studio Video dan Film
40	Lambang Garuda Pancasila	2	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
41	Dispenser	1	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
42	Gorden	5	Set	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
43	Bracket Gantung	1	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
44	PC Unit	82	Unit	Personal Komputer
45	Lap Top	39	Unit	Personal Komputer



NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3		4
46	Note Book/NetBook	9	Unit	Personal Komputer
47	Palm Top	10	Unit	Personal Komputer
48	Hard Disk	39	Unit	Peralatan Personal Komputer
49	External	13	Unit	Peralatan Personal Komputer
50	Printer	45	Unit	Peralatan Personal Komputer
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah	Meubelair
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Buah	Meubelair
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	Buah	Meubelair
54	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	74	Buah	Meubelair
55	Meja Operator	8	Buah	Meubelair
56	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	1	Buah	Meubelair
57	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	15	Buah	Meubelair
58	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	26	Buah	Meubelair
59	Meja Panjang (Lokal)	5	Buah	Meubelair
60	Buffet Kaca	2	Buah	Meubelair
61	Scanner	4	Unit	Peralatan Personal Komputer
62	LCD Projector/Infocus	17	Unit	Peralatan Kantor Lainnya
63	Compact Disc Player	2	Unit	Peralatan Studio Audio
64	Uninterruptible Power Supply	43	Unit	Peralatan Studio Audio
65	Drone (Kamera Udara)	1	Set	Peralatan Studio Video dan Film
66	Camera Control Television System (CCTV)	15	Unit	Peralatan Kantor Lainnya
67	Wireless	10	Unit	Peralatan Jaringan
68	Microphone/Wireless MIC	23	Unit	Peralatan Studio Video dan Film
69	Camera Digital	9	Unit	Peralatan Studio Video dan Film



NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3		4
70	Handy Cam	3	Unit	Peralatan Studio Video dan Film
71	Digitzer	1	Unit	Peralatan Personal Komputer
72	Memory (SFP Konektor)	34	Unit	Peralatan Jaringan
73	Memory	11	Unit	Peralatan Personal Komputer
74	Server	31	Unit	Peralatan Jaringan
75	Router	36	Unit	Peralatan Jaringan
76	Hub	29	Unit	Peralatan Jaringan
77	Switch	165	Buah	Peralatan Jaringan
78	Client	18	Buah	Peralatan Jaringan
79	Acces Point	307	Buah	Peralatan Jaringan
80	Mouse	21	Buah	Kelengkapan Komputer
81	Video Processor	15	Unit	Peralatan Studio Video dan Film
82	Layar Film	5	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
83	Amplifier	2	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
84	Sound System	6	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
85	Telephone PABX	13	Buah	Alat Komunikasi
86	Faximile	2	Buah	Alat Komunikasi
87	Unit Pemancar UHF Portable	2	Unit	Peralatan Pemancar
88	Antena SHF Stationary	1	Unit	Peralatan Antena SHF/Parabola
89	Tabung Pemadam Kebakaran/Portable	2	Buah	Alat Pemadam Kebakaran
90	Scurity Door	1	Buah	Peralatan Kantor Lainnya
91	Firewall	2	Unit	Peralatan Jaringan
92	Camera Conference	5	Unit	Peralatan Studio Video dan Film
93	Lemari Kaca	2	Buah	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor



NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3		4
94	Crimping Tolls	5	Buah	Alat Pemotong Serat Optik (Standard Tolls)
95	Fusion Splicer	1	Buah	Peralatan Jaringan
96	Smart Pencil	2	Buah	Peralatan Mini Komputer
97	Video Splitter	4	Buah	Peralatan Studio Video dan Film
98	Speaker Komputer	10	Buah	Peralatan Mini Komputer
99	Tablet PC (Palm Top)	12	Unit	Personal Komputer
100	Fiber Optic Operating	1	Buah	Alat Ukur Instrument Workshop
101	Remote Control Unit	1	Unit	Peralatan Studio Audio
102	Video Wall Controler	1	Unit	Komputer Jaringan
103	Chairman/Audio Conference	5	Unit	Peralatan Studio Audio
104	Tripod Camera	13	Unit	Peralatan Studio Video dan Film
105	Lensa Kamera	3	Unit	Peralatan Studio Video dan Film
106	Thermo Gun	2	Buah	Alat Laboratorium Lainnya
107	Camera Video	2	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
108	Network Cable Tester	1	Buah	Peralatan Jaringan
109	Audio Control Master Unit/Standard VB	1	Unit	Peralatan Studio Audio
110	Audio Maximizer	4	Unit	Peralatan Studio Audio
111	Alat Pengamatan Sinyal (Radio)	1	Unit	Alat Kantor Lainnya
112	Tas Kamera	2	Unit	Peralatan Studio Video dan Film
113	Handy Talky	3	Unit	Peralatan Komunikasi
114	Optical Power Meter	1	Unit	Peralatan Jaringan
115	Rak Server	25	Unit	Peralatan Jaringan
116	Modem Orbit	6	Unit	Peralatan Jaringan
117	Acces Control System	1	Set	Peralatan Kantor Lainnya
118	Fire Suppression System	1	Paket	Peralatan Kantor Lainnya
119	Environment Monitoring System	1	Paket	Peralatan Kantor Lainnya



NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3		4
120	Precision Air Conditioning	2	Unit	Alat Pendingin Ruangan

*Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo Prov. Kalbar Desember 2023

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan Program Kerja di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. Perumusan Kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. Pelaksanaan Kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menghadapi beberapa tantangan terhadap kelancaran tugas pokok yang akan berpengaruh terhadap roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya.

Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Mempertahankan Peringkat keterbukaan informasi Provinsi Kalimantan Barat yang sudah tergolong “Informatif”.
2. Keterbatasan tenaga teknis yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, terutama di daerah Blankspot.
4. Penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk menangkal berita hoax maupun ujaran kebencian.
5. Peningkatan jumlah data statistik sektoral Kalimantan Barat yang sudah terintegrasi dalam satu portal harus terus dilakukan untuk mewujudkan Satu Data dan Open Data Kalbar.
6. Peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral di Provinsi Kalimantan Barat dari Nilai 1,86 menjadi 3.
7. Integrasi layanan publik dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menuju *Smart Province*.
8. Peningkatan indeks keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dari “Cukup” menjadi “Baik”

Ada beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai visi dan misi diantaranya sebagai berikut :



1. Pembinaan terkait implementasi pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui optimalisasi peran PPID Pembantu dan Humas di seluruh OPD terus ditingkatkan.
2. Integrasi Teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan intra pemerintah daerah dan penyediaan internet untuk OPD sudah terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar.
3. Pembangunan BTS (Base Transceiver Station) di wilayah blankspot terus diusulkan setiap tahun kepada Pemerintah Pusat untuk mengurangi daerah Blankspot di Kalimantan Barat.
4. Mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai media komunikasi publik untuk penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah dalam rangka menangkal berita hoax dan ujaran kebencian.
5. Meningkatkan Tingkat Kematangan Domain Penilaian Indeks Pembangunan Statistik Sektoral Pemprov. Kalbar agar mendapatkan Predikat “Baik”.
6. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Secara Efektif, Efisien dan Berkesinambungan.
7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemprov Kalbar Tahun 2022 peringkat 2 nasional.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Adapun permasalahan yang menjadi isu sektoral sebagai berikut:

1. Belum optimalnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maupun di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Belum optimalnya peningkatan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur keamanan informasi;
3. Belum optimalnya Integrasi Sistem Informasi dan Jaringan Internet (WAN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, maupun antar Pemerintah Kabupaten/ Kota;
4. Belum optimalnya Kebijakan Satu Data dan Open Government di Kalimantan Barat;
5. Belum optimalnya Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) karena seluruh aspek belum mencapai predikat Baik dan seluruh indikator belum ada yang mencapai tingkat kematangan terdefinisi mencakup antara lain standar data statistik, metadata statistik, interoperabilitas data, serta kode referensi dan/atau data induk.
6. Masih banyaknya kebutuhan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Wilayah Blankspot di Provinsi Kalimantan Barat;
7. Diseminasi Informasi dan Literasi;



8. Belum optimalnya Pembinaan Lembaga Media Lokal;
9. Belum optimalnya pembinaan Humas OPD di Lingkungan Pemprov. Kalbar;
10. Belum optimalnya integrasi aplikasi dan layanan publik berbasis elektronik dalam rangka mewujudkan Smart Province.

3.2. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa faktor penghambat dan kendala dari pelayanan perangkat daerah, yaitu:

1. Masih terbatasnya ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta jumlah staf yang belum sesuai dengan kebutuhan OPD.
2. Sumber daya dan sarana prasarana dalam menunjang pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk integrasi layanan dan integrasi jaringan masih terbatas.
3. Masih terdapatnya area blankspot di sejumlah daerah dan desa Kalimantan Barat sehingga menjadi kendala dan tantangan dalam penyebaran informasi kebijakan dan informasi pembangunan.
4. Terbatasnya sumber daya dan prasarana untuk meningkatkan keamanan data dan informasi dalam implementasi SPBE.
5. Banyak beredarnya informasi “hoax” melalui media sosial sehingga menjadi tantangan bagi OPD untuk mengklarifikasi, dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Selain itu, terdapat beberapa faktor pendorong yang mendukung pencapaian kinerja, diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan integrasi jaringan intra pemerintah daerah sudah dilaksanakan secara bertahap dan menuju integrasi layanan



publik dalam rangka mewujudkan “**smart province**” sebagai bentuk layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

2. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga memudahkan dalam penyebaran dan pelayanan informasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan adanya kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan data dan informasi.
4. Wawasan dan pengetahuan masyarakat meningkat seiring berkembangnya TIK.
5. Mulai terbangunnya pemahaman semua pihak tentang pentingnya pengamanan informasi termasuk untuk menangkal penyebaran informasi hoax.
6. Mulai berkurangnya jumlah blank spot di Kalimantan Barat dalam 5 tahun terakhir.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pendataan dan pemetaan wilayah blankspot secara spasial (dalam bentuk peta) sudah dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kemenkominfo melalui koordinasi perencanaan untuk mendukung pembangunan di Wilayah 3T dan Perbatasan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan di atas, berikut dirumuskan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026, sebagai berikut:



1. Masih belum optimalnya pelayanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Kalbar untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemprov Kalbar;
3. Masih belum optimalnya Integrasi Sistem Informasi dan Jaringan Internet (WAN) dalam rangka Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Belum optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Pemprov. Kalbar.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4. 1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan ialah sesuatu yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu 3 tahun (2024 – 2026). Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat konsisten dengan tugas pokok dan fungsi yang kolektif menggambarkan arah strategis dinas dan perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut yaitu **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi”**

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Dinas Diskominfo Prov. Kalbar berfokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dirumuskan untuk masing-masing tujuan, yaitu:



Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah

TUJUAN RENSTRA							SASARAN RENSTRA						
TUJUAN OPD	INDIKATOR	TARGET					SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET CAPAIAN				
		Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			KONDISI AWAL 2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Aman dan Terintegrasi	Nilai Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	90,14	90,64	91,14	91,64	91,64	Meningkatnya Pembinaan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Kalbar	Persentase OPD dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang memenuhi standar layanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Predikat Penilaian SPBE	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Meningkatnya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	3,58	3,63	3,68	3,73	3,73
	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	1,86	2,3	2,6	3	3	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang mendukung tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	5,71%	14,29%	25,71%	48,57%	48,57%
	Indeks Keamanan Informasi	459	500	467	512	512	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	71,16%	77,51%	51,00%	56,00%	56,00%
	Predikat Penilaian SPBE	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,20	76,35	76,50	76,65	76,65



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Memberikan pembinaan dan mengarahkan kepada perangkat daerah yang belum informatif agar memperbaiki pelayanan dalam memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, dan bagi yang sudah informatif untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan;
2. Mengembangkan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang akan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas data statistik sektoral untuk pencapaian kebijakan di instansi pemerintah secara berkelanjutan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mencapai sasaran sesuai visi yang dituju diperlukan strategi tertentu. Strategi tersebut secara garis besar berupaya mengatasi permasalahan internal maupun eksternal dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, berusaha mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan pemetaan interaksi antar faktor melalui analisis SWOT, dapat dirumuskan sejumlah isu strategis yang diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Selanjutnya dari sejumlah



isu strategis tersebut, dipilih sejumlah alternatif sebagai sasaran strategis setelah mempertimbangkan beberapa faktor baik urgensi, kemampuan, biaya, kelayakan dan legalitas.

Strategi yang dapat dirumuskan untuk mendukung capaian kinerja dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2024-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan peran PPID Pembantu dan Humas seluruh OPD dalam pelayanan dan penyebaran informasi untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi
2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peningkatan Indeks Pembangunan Statistik Sektoral Kalimantan Barat ;
4. Peningkatan Keamanan Informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan layanan persandian;



Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan			
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi	Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	Peningkatan peran PPID Pembantu dan Humas seluruh OPD dalam pelayanan dan penyebaran informasi untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi	Memberikan pembinaan dan mengarahkan kepada perangkat daerah yang belum informatif agar memperbaiki pelayanan dalam memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, dan bagi yang sudah informatif untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan;
	Meningkatnya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	Mengembangkan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang akan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang mendukung tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Peningkatan indeks pembangunan statistik sektoral kalimantan barat;	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral untuk pencapaian kebijakan di instansi pemerintah secara berkelanjutan.
	Meningkatnya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Peningkatan Keamanan Informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan layanan persandian;	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
	Terwujudnya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Urusan Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Terselenggaranya Urusan Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemprov. Kalbar untuk pencapaian kinerja dan reformasi birokrasi	Mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui peningkatan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menetapkan program kerja prioritas yang akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan. Program kerja prioritas ini terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Selain program kerja prioritas, terdapat program kerja yang bersifat menunjang kebutuhan administrasi perkantoran yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Adapun penjelasan secara rinci rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam revisi Rencana Strategis ini yaitu dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR 2024-2026

Tujuan RPJMD	Indikator	TUJUAN RENSTRA							SASARAN RENSTRA						PROGRAM							
		TUJUAN OPD	Indikator	Target				SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET CAPAIAN					PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Awal 2023	TARGET				
				Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026			Kondisi Akhir	KONDISI AWAL 2023	2024	2025	2026				KONDISI AKHIR	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Aman dan Terintegrasi	Nilai Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	90,14	90,64	91,14	91,64	91,64	Meningkatnya Pembinaan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Kalbar	Persentase OPD dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang memenuhi standar layanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	65%	70%	75%	80%	80%
																Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%	
																Persentase Media Komunikasi Publik yang dikelola oleh OPD	76,27	85,17	92,57	100	100	
			Predikat Penilaian SPBE	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Meningkatnya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	3,58	3,63	3,68	3,73	3,73	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Total Bobot Domain Evaluasi SPBE	71,60% (=3,58/5*100) Baik	72,60 (=3,63/5*100) Sangat Baik	73,60% (=3,68/5*100) Sangat Baik	74,60% (=3,73/5*100) Sangat Baik	74,60% (=3,73/5*100) Sangat Baik
			Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	1,86	2,3	2,6	3	3	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang mendukung tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	5,71%	14,29%	25,71%	48,57%	48,57%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Perangkat Daerah yang mendukung tingkat kematangan dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	5	7	10	10
			Indeks Keamanan Informasi	459	500	467	512	512	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	71,16%	77,51%	51,00%	56,00%	56,00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	76,59	78,99	79,99	80,99	80,99
			Predikat Penilaian SPBE	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,20	76,35	76,50	76,65	76,65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Target Kinerja Program	100%	100%	100%	100%	100%
																Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	96,97	100%	100%	100%	100%	
																Nilai IKM Perangkat Daerah	88,19	89,07	89,96	90,86	90,86	

TABEL 6.1
CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

PROGRAM								KEGIATAN					SUB KEGIATAN										Penanggung jawab				
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.	2026		Rp.	Kondisi Akhir		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	65%	70%	75%	80%	80%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah isu dan opini publik yang diakomodir	400 opini	420 opini	440 opini	460 opini	460 Opini	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	4 Dokumen	Rp. 141.499.000	-	-	-	-	-	Bidang Informasi Publik		
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-	-	-			200 Rekomendasi	Rp. 186.499.000	200 Rekomendasi	Rp. 586.499.000	200 Rekomendasi	Bidang Informasi Publik												
	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk PPIID dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	NA	NA	NA	-	-	-	-	-	-	Bidang Informasi Publik			
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	6 Dokumen	Rp. 361.798.000		-	-	-	-	-	Bidang Informasi Publik														
		Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	N/A	0	Rp. -		-	-	-	-	-	-	Bidang Informasi Publik													
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	N/A	0 Dokumen	Rp. -		-	-	-	-	-	Bidang Informasi Publik														
		Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	N/A	N/A	0		100%	Rp5.000.000	100%	Rp. 200.000.000	100%	Bidang Informasi Publik														
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	N/A	N/A	0		40 Permohonan	Rp. 361.798.000	50 Permohonan	Rp. 541.798.000	50 Permohonan	Bidang Informasi Publik														
		Jumlah KI Kalbar yang menerima Hibah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Komisi	1 Komisi	1 Komisi		1 Komisi	1 Komisi	1 Komisi	1 Komisi	1 Komisi	1 Komisi	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Informasi Publik			
		Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	N/A	N/A	0		2 Laporan	Rp. 2.000.000.000	2 Laporan	Rp. 2.000.000.000	2 Laporan	Bidang Informasi Publik														

PROGRAM						KEGIATAN					SUB KEGIATAN										Penanggung jawab						
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025		Rp.	2026	Rp.	Kondisi Akhir		
	2. Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan komunikasi publik perangkat daerah	Persentase media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	76,27	85,17	92,57	100	100		persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kalimantan Barat yang dibina	51%	65%	75%	100%	100%	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	2 Dokumen	Rp. 1.090.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Informasi Publik dan Bidang Komunikasi Publik		
															Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	N/A	N/A	0	28 Komunitas	Rp. 92.303.000	28 Komunitas	Rp. 96.918.150	28 Komunitas	Bidang Komunikasi Publik		
									Jumlah media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 200.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Komunikasi Publik		
															Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 2.211.610.000	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Komunikasi Publik		
															Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	250 Orang	250 Orang	Rp. 119.918.000	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Komunikasi Publik		
															Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	3 Layanan	Rp. 174.082.000	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Komunikasi Publik		
															Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	N/A	0 Dokumen	0	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Komunikasi Publik		
															Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	N/A	0 Dokumen	0	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Komunikasi Publik		
															Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	N/A	N/A	0	2 Media (Website dan Mobile)	Rp. 220.000.000	2 Media (Website dan Mobile)	Rp. 231.000.000	2 Media (Website dan Mobile)	Bidang Komunikasi Publik		
															Penyusunan Konten Publik	Jumlah Konten Informasi Publik	N/A	N/A	0	3 Konten (Konten Kesehatan, Ekonomi dan Pembangunan)	Rp. 664.806.000	3 Konten (Konten Kesehatan, Ekonomi dan Pembangunan)	Rp. 698.046.300	3 Konten (Konten Kesehatan, Ekonomi dan Pembangunan)	Bidang Komunikasi Publik		
															Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	N/A	N/A	0	75 Persentase	Rp. 1.508.306.000	75 Persentase	Rp. 1.508.306.000	75 Persentase	Bidang Komunikasi Publik		
															Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp. 38.444.000	1 Dokumen	Rp. 38.444.000	1 Dokumen	Bidang Komunikasi Publik		
															Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	N/A	N/A	0	160 Orang	Rp. 133.132.000	160 Orang	Rp. 139.788.600	160 Orang	Bidang Komunikasi Publik		
															Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi	N/A	N/A	0	1 Laporan	Rp. 188.356.500	1 Laporan	Rp. 197.774.325	1 Laporan	Bidang Komunikasi Publik		

PROGRAM						KEGIATAN					SUB KEGIATAN									Penanggung jawab							
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.		2025	Rp.	2026	Rp.	Kondisi Akhir		
															Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	/A/	/A/	/A/	/A/	0	/A/	0	/A/	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	/A/	/A/	/A/	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp.	75.790.400	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Aplikasi dan Informatika	
															Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	14 Data Kab/Kota	10 Perangkat Daerah	Rp.	67.164.400	/A/	0	/A/	0	/A/	Bidang Aplikasi dan Informatika	
															Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang ditetapkan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp.	71.381.400	1 Dokumen	Rp.	78.519.540	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	N/A	N/A	0	10 Aplikasi	Rp.	71.381.400	10 Aplikasi	Rp.	78.519.540	10 Aplikasi	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	N/A	N/A	0	2 Dokumen	Rp.	71.381.400	2 Dokumen	Rp.	78.519.540	2 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	N/A	N/A	0	2 Laporan	Rp.	71.381.400	2 Laporan	Rp.	78.519.540	2 Laporan	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	N/A	N/A	0	10 Aplikasi	Rp.	796.381.400	10 Aplikasi	Rp.	876.019.540	10 Aplikasi	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	N/A	N/A	0	14 Kabupaten / Kota / Unit	Rp.	61.985.400	kabupaten / Kota /	Rp.	68.183.940	Kabupaten / Kota /	Bidang Aplikasi dan Informatika

PROGRAM						KEGIATAN					SUB KEGIATAN										Penanggung jawab						
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perubahan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025		Rp.	2026	Rp.	Kondisi Akhir		
															Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	N/A	N/A	0	3 kabupaten/kota	Rp. 61.985.400	5 kabupaten/kota	Rp. 68.183.940	5 kabupaten/kota	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	N/A	N/A	0	5 Aplikasi	Rp. 61.985.400	5 Aplikasi	Rp. 68.183.940	5 Aplikasi	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemd yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	N/A	N/A	0	20 Layanan	Rp. 61.985.400	20 Layanan	Rp. 102.261.400	20 Layanan	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp. 61.985.400	1 Dokumen	Rp. 102.261.400	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp. 61.985.400	1 Dokumen	Rp. 68.183.940	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp. 46.823.400	1 Dokumen	Rp. 51.505.740	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Koordinasi penyusunan proses bisnis di Dinas Kominfo	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp. 61.985.400	1 Dokumen	Rp. 68.183.940	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	N/A	N/A	0	35 Perangkat Daerah	Rp. 3.646.823.400	35 Perangkat Daerah	Rp. 4.011.505.740	35 Perangkat Daerah	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	N/A	N/A	0	5 Aplikasi	Rp. 61.985.400	5 Aplikasi	Rp. 68.183.940	5 Aplikasi	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp. 61.985.400	1 Dokumen	Rp. 68.183.940	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika		

PROGRAM							KEGIATAN						SUB KEGIATAN										Penanggung jawab				
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.	2026		Rp.	Kondisi Akhir		
															Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp. 3.224.085.400	1 Dokumen	Rp. 3.546.493.940	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	N/A	N/A	0	35 Perangkat Daerah	Rp. 3.286.823.400	35 Perangkat Daerah	Rp. 3.615.505.740	35 Perangkat Daerah	Bidang Aplikasi dan Informatika		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan integrasi data statistik sektoral Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendukung tingkat kematangan dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	5	7	10	10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah	35 Perangkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 215.749.400	N/A	0	N/A	0	N/A	-						
															Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang di himpun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 63.258.100	N/A	0	N/A	0	N/A	-		
															Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	90 orang	104 Orang	Rp. 77.764.700	N/A	0	N/A	0	N/A	-		
															Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 91.350.000	N/A	0	N/A	0	N/A	-		
															Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	104 Orang	104 Orang	Rp. 98.057.976	N/A	0	N/A	0	N/A	-		
															Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1 Unit	Rp. 105.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	-		
															Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	N/A	N/A	0	104 orang	74.675.800,00	104 orang	Rp. 82.143.380	104 orang	Bidang Persandian dan Statistik		
															Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	N/A	N/A	0	100%	5.000.000,00	100%	Rp. 101.345.300	100%	Bidang Persandian dan Statistik		
															Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau	N/A	N/A	0	100%	5.000.000,00	100%	Rp. 101.795.300	100%	Bidang Persandian dan Statistik		
															Relaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	N/A	N/A	0	1 Dokumen	256.426.300,00	1 Dokumen	Rp. 282.068.930	1 Dokumen	Bidang Persandian dan Statistik		
															Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	N/A	N/A	0	1 Dokumen	63.258.100,00	1 Dokumen	Rp. 69.583.910	1 Dokumen	Bidang Persandian dan Statistik		

PROGRAM						KEGIATAN						SUB KEGIATAN										Penanggung jawab										
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target															
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.		2026	Rp.	Kondisi Akhir							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI	Terselenggaranya pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	76,59	78,99	79,99	80,99	80,99	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 74.009.400	1 Laporan	Rp. 81.410.340	1 Laporan	Rp. 89.551.374	1 Laporan	Bidang Persandian dan Statistik							
															Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	Rp. 205.176.900	35 Perangkat Daerah	Rp. 225.694.590	35 Perangkat Daerah	Rp. 248.264.049	35 Perangkat Daerah	Bidang Persandian dan Statistik							
															Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	5 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 30.153.900	1 Dokumen	Rp. 33.169.290	1 Dokumen	Rp. 36.486.219	1 Dokumen	Bidang Persandian dan Statistik							
															Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 46.931.100	1 Laporan	Rp. 51.624.210	1 Laporan	Rp. 56.786.631	1 Laporan	Bidang Persandian dan Statistik							
															Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase OPD yang telah terhubung dengan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	Rp. 20.691.600	35 Perangkat Daerah	Rp. 22.760.760	35 Perangkat Daerah	Rp. 25.036.836	35 Perangkat Daerah	Bidang Persandian dan Statistik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya urusan komunikasi dan lingkungan Pemprov. Kalbar	Persentase Capaian Target Kinerja Program	100%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	5 Dokumen	Rp. 177.990.290	2 Dokumen	Rp. 195.789.319	2 Dokumen	Rp. 215.368.251	8 Dokumen	SEKRETARIAT							
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 3.211.800	1 Dokumen	Rp. 3.532.980	1 Dokumen	Rp. 3.886.278	1 Dokumen	SEKRETARIAT							
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 2.262.400	1 Dokumen	Rp. 2.488.640	1 Dokumen	Rp. 2.737.504	1 Dokumen	SEKRETARIAT							
															Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 3.100.000	1 Dokumen	Rp. 3.410.000	1 Dokumen	Rp. 3.751.000	1 Dokumen	SEKRETARIAT							
															Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 3.200.000	1 Dokumen	Rp. 3.520.000	1 Dokumen	Rp. 3.872.000	1 Dokumen	SEKRETARIAT							
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Rp. 8.600.000	3 Laporan	Rp. 9.460.000	3 Laporan	Rp. 10.406.000	3 Laporan	SEKRETARIAT							

PROGRAM								KEGIATAN						SUB KEGIATAN										Penanggung jawab			
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.	2026	Rp.		Kondisi Akhir		
															Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	Rp. 36.800.000	5 laporan	Rp. 40.480.000	5 laporan	Rp. 44.528.000	5 laporan	Rp.	5 laporan	SEKRETARIAT
		Persentase Capaian Target Kinerja Program	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	1 dokumen	Rp. -	1 dokumen	Rp. 10.000.000	1 dokumen	Rp. 11.000.000	1 dokumen	Rp.	1 dokumen	SEKRETARIAT
															Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Paket Pakaiannya	N/A	0 Paket	Rp. -	1 Paket	Rp. 46.898.341	1 Paket	Rp. 51.588.176	1 Paket	Rp.	1 Paket	SEKRETARIAT
															Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 4.814.200	1 Dokumen	Rp. 5.295.620	1 Dokumen	Rp. 5.825.182	1 Dokumen	Rp.	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 1.760.000,00	1 Dokumen	Rp. 1.936.000	1 Dokumen	Rp. 2.129.600	1 Dokumen	Rp.	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 2.800.000,00	1 Dokumen	Rp. 3.080.000	1 Dokumen	Rp. 3.388.000	1 Dokumen	Rp.	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	N/A	5 ASV	0	1 dokumen	Rp. 10.000.000	1 dokumen	Rp. 11.000.000	1 dokumen	Rp.	1 dokumen	SEKRETARIAT
															Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 ASN	55 ASN	Rp. 271.270.000	55 ASN	Rp. 298.397.000	55 ASN	Rp. 328.236.700	55 ASN	Rp.	55 ASN	SEKRETARIAT
															Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	50 PNS	0	1 dokumen	Rp. 10.000.000	1 dokumen	Rp. 11.000.000	1 dokumen	Rp.	1 dokumen	SEKRETARIAT
															Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	55 Orang	Rp. 23.980.000	55 Orang	Rp. 26.378.000	55 Orang	Rp. 29.015.800	55 Orang	Rp.	55 Orang	SEKRETARIAT
		Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	96,97	100%	100%	100%	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 ASN	55 ASN	Rp. 9.282.038.835	55 ASN	Rp. 10.210.242.719	55 ASN	Rp. 11.231.266.990	55 ASN	Rp.	55 ASN	SEKRETARIAT
															Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 5.000.000	1 Dokumen	Rp. 5.500.000	1 Dokumen	Rp. 6.050.000	1 Dokumen	Rp.	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Relaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 306.120.000	1 Dokumen	Rp. 336.732.000	1 Dokumen	Rp. 370.405.200	1 Dokumen	Rp.	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp. 3.860.000	4 Dokumen	Rp. 4.246.000	4 Dokumen	Rp. 4.670.600	4 Dokumen	Rp.	4 Dokumen	SEKRETARIAT

PROGRAM						KEGIATAN						SUB KEGIATAN										Penanggung jawab					
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.		2026	Rp.	Kondisi Akhir		
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	0 Laporan	0	1 Laporan	Rp. 10.000.000	1 Laporan	Rp. 11.000.000	1 Laporan	Rp. 11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT
															Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 1.552.300	1 Dokumen	Rp. 1.707.530	1 Dokumen	Rp. 1.878.283	1 Dokumen	Rp. 1.878.283	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 1.440.000	12 Laporan	Rp. 1.584.000	12 Laporan	Rp. 1.742.400	12 Laporan	Rp. 1.742.400	12 Laporan	SEKRETARIAT
															Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	Rp. 10.000.000	1 dokumen	Rp. 11.000.000	1 dokumen	Rp. 11.000.000	1 dokumen	SEKRETARIAT
		Nilai IKM Perangkat Daerah	88,19	89,07	89,96	90,86	90,86	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 2.487.500	1 Dokumen	Rp. 2.736.250	1 Dokumen	Rp. 3.009.875	1 Dokumen	Rp. 3.009.875	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	Rp. 10.000.000	1 Dokumen	Rp. 11.000.000	1 Dokumen	Rp. 11.000.000	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 Laporan	0,00	1 Laporan	Rp. 10.000.000	1 Laporan	Rp. 11.000.000	1 Laporan	Rp. 11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT
															Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1 Laporan	0,00	1 Laporan	Rp. 10.000.000	1 Laporan	Rp. 11.000.000	1 Laporan	Rp. 11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT
															Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1 Laporan	0,00	1 Laporan	Rp. 10.000.000	1 Laporan	Rp. 11.000.000	1 Laporan	Rp. 11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT
															Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	1 Laporan	0,00	1 Laporan	Rp. 10.000.000	1 Laporan	Rp. 11.000.000	1 Laporan	Rp. 11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT

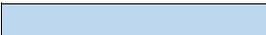
PROGRAM							KEGIATAN						SUB KEGIATAN										Penanggung jawab				
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.	2026		Rp.	Kondisi Akhir		
															Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 Dokumen	Rp. 0,00	1 Dokumen	Rp. 10.000.000	1 Dokumen	Rp. 11.000.000	1 Dokumen	Rp. 11.000.000	1 Dokumen	SEKRETARIAT
		Nilai IKM Perangkat Daerah	88,19	89,07	89,96	90,86	90,86	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 23.239.000	1 Paket	Rp. 25.562.900	1 Paket	Rp. 28.119.190	1 Paket	Rp. 28.119.190	1 Paket	SEKRETARIAT
															Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 53.324.600	1 Paket	Rp. 58.657.060	1 Paket	Rp. 64.522.766	1 Paket	Rp. 64.522.766	1 Paket	SEKRETARIAT
															Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 26.759.500	1 Paket	Rp. 29.435.450	1 Paket	Rp. 32.378.995	1 Paket	Rp. 32.378.995	1 Paket	SEKRETARIAT
															Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 63.960.000	1 Paket	Rp. 70.356.000	1 Paket	Rp. 77.391.600	1 Paket	Rp. 77.391.600	1 Paket	SEKRETARIAT
															Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 19.999.800	1 Paket	Rp. 21.999.780	1 Paket	Rp. 24.199.758	1 Paket	Rp. 24.199.758	1 Paket	SEKRETARIAT
															Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp. 6.400.000	5 Dokumen	Rp. 7.040.000	5 Dokumen	Rp. 7.744.000	5 Dokumen	Rp. 7.744.000	5 Dokumen	SEKRETARIAT
															Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A	N/A	Rp. -	1 Paket	Rp. 5.000.000	1 Paket	Rp. 5.000.000	1 Paket	Rp. 5.000.000	1 Paket	SEKRETARIAT
															Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 19.824.000	1 Laporan	Rp. 21.806.400	1 Laporan	Rp. 23.987.040	1 Laporan	Rp. 23.987.040	1 Laporan	SEKRETARIAT
															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 224.984.695	1 Laporan	Rp. 247.483.165	1 Dokumen	Rp. 272.231.481	1 Dokumen	Rp. 272.231.481	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	Rp. 2.860.000	1 Dokumen	Rp. 3.146.000	1 Dokumen	Rp. 3.146.000	1 Dokumen	SEKRETARIAT

PROGRAM						KEGIATAN						SUB KEGIATAN										Penanggung jawab					
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.		2026	Rp.	Kondisi Akhir		
															Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	1 dokumen	0	1 dokumen	Rp. 10.000.000	1 dokumen	Rp. 11.000.000	1 dokumen	SEKRETARIAT		
																								SEKRETARIAT			
		Nilai IKM Perangkat Daerah	88,19	89,07	89,96	90,86	90,86	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Barang Milik Daerah	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp. -	1 paket	Rp. 50.000.000	1 paket	Rp. 60.000.000	1 paket	SEKRETARIAT		
															Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	Rp. 259.935.000	6 Unit	Rp. 285.928.500	6 Unit	Rp. 314.521.350	6 Unit	SEKRETARIAT		
															Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Rp. -	1 Unit	Rp. 20.000.000	1 Unit	Rp. 22.000.000	1 Unit	SEKRETARIAT		
															Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	Rp. -	1 Paket	Rp. 20.000.000	1 Unit	Rp. 20.000.000	1 Unit	SEKRETARIAT		
															Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	Rp. -	1 Paket	Rp. 19.635.000	1 Unit	Rp. 21.598.500	1 Unit	SEKRETARIAT		
		Nilai IKM Perangkat Daerah	88,19	89,07	89,96	90,86	90,86	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 1.105.605	1 Laporan	Rp. 1.216.166	1 Laporan	Rp. 1.337.782	1 Laporan	SEKRETARIAT		
															Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	1 Laporan	Rp. -	1 Laporan	Rp. 10.000.000	1 Laporan	Rp. 11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT		
															Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 9.900.000	1 Laporan	Rp. 10.890.000	1 Laporan	Rp. 11.979.000	1 Laporan	SEKRETARIAT		
															Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 1.812.509.660	1 Laporan	Rp. 1.993.760.626	1 Laporan	Rp. 2.193.136.689	1 Laporan	SEKRETARIAT		
		Nilai IKM Perangkat Daerah	88,19	89,07	89,96	90,86	90,86	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan/Rehabilitasi	175 Unit	175 Unit	175 Unit	175 Unit	175 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Rp. 41.750.000	2 Unit	Rp. 45.925.000	2 Unit	Rp. 50.517.500,00	2 Unit	SEKRETARIAT		
															Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinnannya	4 Unit (2 mobil dan 2 motor)	4 Unit (2 mobil dan 2 motor)	Rp. 83.040.000	3 Unit (1 mobil dan 2 motor)	Rp. 91.344.000	3 Unit (1 mobil dan 2 motor)	Rp. 100.478.400,00	1 mobil dan 2 motor	SEKRETARIAT		
															Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	1 Unit	Rp. -	1 Unit	Rp. 10.000.000	1 Unit	Rp. 11.000.000	1 Unit	SEKRETARIAT		
															Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 unit	170 unit	Rp. 133.736.000	170 unit	Rp. 147.109.600	170 unit	Rp. 161.820.560	170 unit	SEKRETARIAT		

PROGRAM							KEGIATAN						SUB KEGIATAN										Penanggung jawab					
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target											
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.	2026		Rp.	Kondisi Akhir			
															Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1 Unit	Rp	-	1 Unit	Rp	100.000.000	1 Unit	Rp	100.000.000	1 Paket	SEKRETARIAT
															Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1 Unit	Rp	-	1 Unit	Rp	100.000.000	1 Unit	Rp	100.000.000	1 dokumen	SEKRETARIAT

KETERANGAN :

 SUB KEGIATAN YANG SUDAH TIDAK DIGUNAKAN LAGI/ DIHAPUS

 SUB KEGIATAN PEMUKTAHIRAN / SUB KEGIATAN BARU



6.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan Indikatif bagi program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2024 sampai dengan 2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dapat terlihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat

SASARAN RENSTRA						
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL 2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Kalbar	Persentase OPD dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang memenuhi standar layanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	3,58	3,63	3,68	3,73	3,73
Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang mendukung tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	5,71%	14,29%	25,71%	48,57%	48,57%
Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	71,16%	77,51%	51,00%	56,00%	56,00%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,20	76,35	76,50	76,65	76,65



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 ini memuat perencanaan berbasis kinerja sebagai acuan dan tolak ukur bagi Diskominfo Prov. Kalbar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka mencapai indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja dan target Kepala Daerah, khususnya untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat terkait Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Untuk Perubahan Rencana Strategis ini memuat isu strategis dan isu-isu pokok yang penting, mendasar dan mendesak terkait Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sehingga menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja untuk tiga (tiga) tahun ke depan sesuai dengan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Semoga Perubahan Renstra Diskominfo Prov. Kalbar Tahun 2024-2026 ini dapat di laksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan daya dan hasil guna bagi peningkatan akuntabilitas instansi dalam upaya **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good E-Government”**.

Pontianak, Maret 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



Samuel, SE, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 1966040819931009